



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sudirman No. 27-29 Bukittinggi Telp/Fax (0752) 23976
E-mail: kesbangbkt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 800/17/KKPol-BKT/V-2017

TENTANG

RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi tentang Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 74 Tahun 2016 Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018.

KEDUA : Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah merupakan dokumen perencanaan Tahunan SKPD, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis SKPD, memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi serta berdasarkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

KETIGA : Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kesbangpol
- BAB V : Penutup
- KEEMPAT : Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 31 Mei 2017

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



Tembusan : disampaikan kepada YTH :

1. *Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)*
2. *Inspektur Kota Bukittinggi*
3. *Kepala Bappeda Kota Bukittinggi;*
4. *Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Kota Bukittinggi*
5. *Arsip*



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 800/ 17 /KKPOL-BKT/V-2017
TENTANG
RENCANA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2018**





KESBANGPOL



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2019. Rencana Kerja ini merupakan salah satu bentuk perwujudan kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah guna menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta untuk menjaga konsistensi perencanaan strategis jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini mengacu kepada Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018, evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang ditampung melalui mekanisme musrenbang.

Pada tahun 2018, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merencanakan beberapa program dan kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebagai unsur pelaksana tugas Walikota di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagai bentuk rasa syukur dan untuk menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*, kami senantiasa akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi ke depannya.

Kami berharap Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini dapat memenuhi harapan seluruh stakeholders kota dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan di Kota Bukittinggi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bukittinggi, Mei 2017

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik





DAFTAR ISI

halaman

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	31
3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KESBANGPOL	43
BAB V PENUTUP	47



DAFTAR TABEL

halaman

Tabel. T-C.29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017	12
Tabel. T-C.30.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	18
Tabel. T-C.31.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018	24
Tabel. T-C.32.	Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018 .	28
Tabel. T-C.33.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2018	37
Tabel. T-C.33.	Rencana Kerja Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018	44



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna menjamin pencapaian tujuan nasional dan untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan. Dimana perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan daerah, dengan perencanaan yang tepat berupa penentuan kebijakan yang memperhitungkan sumber daya yang tersedia akan dihasilkan suatu keberhasilan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dimana penyusunan perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka yakni jangka panjang, menengah dan tahunan.

Seiring dengan peraturan perundang-undangan di atas, lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan. Dimana untuk jangka tahunan,



Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sedangkan untuk Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta berdasarkan usulan program serta kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) disusunlah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



3. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (JPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III Serta Rincian Tugas Eselon IV Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
9. Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Nomor 01/KKPol/BKT/2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional tahunan dan juga sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi antara pencapaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah:



1. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2018;
2. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan jangka menengah;
3. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur capaian target kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
4. Instrumen bagi Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan LKIP.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Renja

BAB III HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Memuat kegiatan (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) selanjutnya dikaitkan dengan capaian target renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi, tantangan, peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.



2.4. Reviuw terhadap rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah

Tujuan dan sasaran renja perumusannya didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang berisikan penjelasan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi serta penjelasan bila rumusan tidak sesuai dengan rancangan awal Perangkat Daerah baik jenis, pagu indikatif .

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.

BAB VI PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra tahun 2016 – 2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait hal tersebut Renja Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia (SDM), laporan, buku dan indikator lainnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pada umumnya kegiatan Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi tahun 2016 dapat terlaksana sesuai dengan sasaran kinerja dan hal ini dapat dilihat dari presentase kegiatan yang mencapai 99,15 %.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi pada tahun 2016 untuk belanja langsung sebesar Rp. 2.260.701.362,- (Dua milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) pencapaian 96,14 % yang dijabarkan melalui 9 Program dan 33 kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pada prinsipnya program pelayanan administrasi perkantoran sudah sesuai dengan program kegiatan dengan presentase fisik anggaran



90,91% dengan anggaran Rp. 230.509.162,- (Dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) dengan realisasi Rp. 215.204.963,- (Dua ratus lima belas juta dua ratus empat ribu sembilan enam puluh tiga rupiah).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Belanja Modal Pengadaan perlengkapan kantor lainnya (papan merk kantor dan frame walikota serta wakil walikota).
- Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer (PC dan Laptop).

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai kebutuhan kantor dengan anggaran sebesar Rp.37.200.000,- (Tiga puluh tujuh juta dua ratus rupiah) dengan realisasi Rp.34.530.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi ASN Kantor Kesbangpol.

Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan agar tersedianya pakaian kerja lapangan untuk meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan realisasi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan terlaksananya program ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan, laporan keuangan semesteran, Renja dan Renstra dengan anggaran sebesar Rp. 1.869.250,- (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi Rp. 1.089.650,- (satu juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan untuk pemantauan kegiatan masyarakat di Kota Bukittinggi dalam rangka teeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 14.100.000. (empat belas



juta seratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 12.414.000,00.
(dua belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Forum Pemantapan Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
- Forum Pembauran Kebangsaan

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas terlaksana dengan baik yang meliputi, kegiatan rapat dan koordinasi FKUB guna penyelesaian konflik keagamaan, pelaksanaan pendidikan pelatihan bela negara dengan sasaran generasi muda dan masyarakat serta kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Bukittinggi dengan anggaran sebesar Rp. 184.437.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 178.169.050.-

7. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal, dengan kegiatan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah di Kota Bukittinggi (Permendagri No. 16 Tahun 2011). Kegiatan tersebut diatas terlaksana dengan baik yang koordinasi secara optimal pengelolaan dan pengumpulan bahan keterangan dan Intelijen dari berbagai sumber yang berkaitan dengan potensi gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah, deteksi dini, cegah dini serta lapor dini guna terjaganya kondusifitas daerah dengan anggaran sebesar Rp. 378.730.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 367.078.775,- atau 96,92%

8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, meliputi kegiatan:

- Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.
- Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika Indonesia (KOMPANI) Kota Bukittinggi

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas terlaksana dengan baik yang meliputi, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkotika, terlaksanya pelantikan Komunitas Pemuda Anti Narkotika Indonesia (KOMPANI) Kota Bukittinggi, pembinaan pengurus dan kampanye anti narkotika dengan anggaran sebesar Rp. 48.571.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.051.585,-



9. Program Pendidikan Politik Masyarakat, meliputi kegiatan sebagai berikut
- Koordinasi Forum Diskusi Politik
 - Sosialisasi Undang-Undang Pemilu, Orkemas, dan lain-lain terkait Tupoksi Kesbangpol
 - Penyusunan Data Base Ormas/LSM dan Paol
 - Fasilitasi dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah
 - Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Paol
 - Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat
 - Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
 - Tim Teadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri/Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan-kegiatan tersebut terlaksana dengan baik sesuai dengan program kegiatan Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi meliputi dilaksanakannya forum diskusi politik guna memecahkan permasalahan yang dihadapi, terlaksananya sosialisasi undang-undang pemilu, orkemas, dan lain-lain terkait tupoksi Kesbangpol guna pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, terlaksananya penyusunan database Ormas/LSM bertujuan untuk terdatanya Ormas/LSM dalam rangka pembinaan dan pengawasan, terfasilitasinya pemantauan tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah guna terwujudnya penyelenggaraan pilkada yang demokratis, aman dan lancar, terlaksananya verifikasi administrasi bantuan keuangan Paol guna memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka pencairan bantuan keuangan kepada partai politik, peningkatan kesadaran politik dan organisasi masyarakat guna meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik, dilaksanakannya pembinaan dan fasilitasi pendaftaran ormas guna pemberian hak dan kewajiban pendaftar ormas, penanganan konflik sosial guna stabilitas keamanan, Indikator kegiatan-kegiatan tersebut mencapai 63.64%, s.d. 100% dengan anggaran sebesar Rp.1.356.284.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.311.059.031,-.



Dari 9 program dan 33 kegiatan urusan yang direncanakan, telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja tahun 2016, tidak ada kegiatan yang capaian target kinerjanya melebihi dari target kinerja yang direncanakan.

Meski terdapat beberapa kegiatan pada Tahun 2016 yang realisasi keuangannya di bawah 80%, namun secara keseluruhan, target program di tahun 2016 dapat dicapai.

Agar target yang dijabarkan perencanaan jangka menengah dalam Renja tahunan dan DPA SKPD dapat tercapai dengan maksimal, Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang. Penganggaran kegiatan pokok sebagaimana yang telah tercantum dalam Renstra.

Mendukung terciptanya stabilitas daerah meningkatkan peran dan fungsi Kantor Kesbangpol dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 300/969/SJ tanggal 24 Februari 2015 tentang Pemberdayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dalam rangka menjaga stabilitas daerah, maka Kantor Kesbangpol kedepannya akan :

- Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan :
 - Rawan konflik sosial berlatar belakang sengketa lahan, sengketa SARA, Pilpres dan Pilkada;
 - Terorisme maupun radikal lainnya;
 - Penyakit masyarakat antara lain narkoba, prostitusi, miras;
 - Pengawasan orang/lembaga asing seperti pekerja *illegal*,
- Menerbitkan laporan yang berkaitan dengan aspek aspek diatas serta permasalahan permasalahan lain yang berpotensi menimbulkan instabilitas di daerah serta melaporkannya kepada Walikota sebagai dasar pertimbangan kebijakan untuk membuat kebijakan.



KESBANGPOL



- Meningkatkan kegiatan penanganan gangguan keamanan meliputi pencegahan konflik sosial, penghentian konflik sosial dan pemulihan pasca konflik.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi telah merencanakan beberapa kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota serta Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi, Kantor Kesatuan Bangsa menyelenggarakan kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi serta evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah guna melihat tingkat capaian kinerja program dan kegiatan disajikan pada tabel 2.1. berikut.



KESBANGPOL



Tabel. T-C29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
Kota Bukittinggi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017		CATATAN
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.19											
1.19	1.19.01										
1.19	1.19.01	01									
1.19	1.19.01	01	1	1	300 materai 2 cek	300 materai 2 cek	93%	225 materai 2 cek	225 materai 2 cek	100%	
1.19	1.19.01	01	2	2	12 bulan	12 bulan	88,48%	24 tagihan	24 tagihan	100%	
1.19	1.19.01	01	6	6	1 roda 4 dan 4 roda 2	1 roda 4 dan 4 roda 2	78,72%	1 roda 4 dan 4 roda 2	1 roda 4 dan 4 roda 2	100%	
1.19	1.19.01	01	8	8	1 paket	1 paket	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
1.19	1.19.01	01	9	9	4 komp,5 laptop, 4 printer, 2 mesin tik, 2 TV, 1 AC, 1 exhauste fant	4 komp,5 laptop, 4 printer, 2 mesin tik, 2 TV, 1 AC, 1 exhauste fant	99,89%	4 komp,6 laptop, 3 printer, 1 AC, 2 Exhauste Fan, 2 TV	4 komp,6 laptop, 3 printer, 1 AC, 2 Exhauste Fan, 2 TV	100%	
1.19	1.19.01	01	10	10	1 paket	1 paket	85,94%	43 macam	43 macam	100%	
1.19	1.19.01	01	11	11	7 macam	7 macam	97,81%	7 macam	7 macam	100%	
1.19	1.19.01	01	12	12	1 paket	1 paket	100%	15 buah lampu neon, 2 buah stop kontak, 2 kabel raun	15 buah lampu neon, 2 buah stop kontak, 2 kabel raun	100%	
1.19	1.19.01	01	17	17	1 tahun	1 tahun	57,68%	12 bulan	12 bulan	100%	
1.19	1.19.01	01	18	18	1 tahun	1 tahun	98.1%	12 bulan	12 bulan	100%	
1.19	1.19.01	01	31	31	1 org PPK, 1 org PBBJ, 3 PPHP	1 org PPK, 1 org PBBJ, 3 PPHP	100%	4 paket	4 paket	100%	
1.19	1.19.01	02									



KESBANGPOL



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017		CATATAN
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.19	1.19.01	02	01	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	75%	75%	1 merek kantor, 1 foto + frame walikota dan wakil walikota	1 merek kantor, 1 foto + frame walikota dan wakil walikota	100%	14 jenis	14 jenis	100%	
1.19	1.19.01	02	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	75%	75%	1 PC, 2 laptop	1 PC, 2 laptop	92,58%	6 jenis	6 jenis	100%	
1.19	1.19.01	03		Program peningkatan disiplin aparatur										
1.19	1.19.01	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	pakaian dinas khusus hari tertentu	80%	80%	20 stel	20 stel	100%	-	-	-	
1.19	1.19.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
1.19	1.19.01	06	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Buku LAKIP	90%	90%	10 eks	-	0%	5 eksemplar	5 eksemplar	100%	
1.19	1.19.01	06	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Buku laporan keuangan	90%	90%	10 eks	10 eks	65,52%	2 buku	2 buku	100%	
1.19	1.19.01	06	5	Penyusunan rencana kerja & keuangan perangkat daerah	Buku Renja	90%	90%	10 eks	10 eks	96,13%	18 buku	18 buku	100%	
1.19	1.19.01	06	6	Penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2016-2021	Buku	-	-	10 buku	10 buku	67,08%	-	-	-	
1.19	1.19.01	15		Program peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan										
1.19	1.19.01	15	01	Pemantauan kegiatan orang asing, lembaga asing dan NGO	Laporan Hasil Pemantauan	70%	70%	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%	
				Pemantauan dan pengawasan kegiatan Masyarakat	Laporan Hasil Pemantauan	-	-	10 laporan	10 laporan	88%	-	-	-	
1.19	1.19.01	15	03	Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Kemasyarakatan	Laporan Hasil Pemantauan	-	-	-	-	-				
1.19	1.19.01	16		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan										
1.19	1.19.01	16	01	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Laporan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	-	120 orang	120 orang	100%	
				Pelaksanaan upacara kesadaran nasional dan hari besar lainnya	Pelaksanaan upacara	-	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%	
1.19	1.19.01	16	03	Forum Pemantapan kerukunan antar umat beragama	Laporan Dewan Penasehat FKUB	70%	70%	1 laporan	1 laporan	98,86%	1 laporan	1 laporan	100%	
				Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan (FPWK) bagi Mahasiswa/Siswa/Tokoh Masyarakat/Ormas/Paol	Peserta FPWK	70%	70%	-	-	-	-	-	-	



KESBANGPOL



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017		CATATAN
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				Penyuluhan Wawasan Nusantara dan Bela Negara	Meningkatnya Kesadaran Bela negara	70%	70%	-	-	-	-	-	-	
1.19	1.19.01	16	04	Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya Kesadaran Bela negara	-	-	140 orang	140 orang	96,91%	100 orang	100 orang	100%	
1.19	1.19.01	16	05	Forum Pembauran Kebangsaan	Laporan Forum Pembauran Kebangsaan	-	-	60 orang	60 orang	89,54%	1 laporan	1 laporan	100%	
1.19	1.19.01	17		Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindakan kriminal										
1.19	1.19.01	17	01	Operasionalisasi komunitas inteljeen daerah	Laporan operasional Kominda	90%	90%	12 laporan	12 laporan	96.92%	12 laporan	12 laporan	100%	
1.19	1.19.01	17	02	Operasionalisasi Forum kewaspadaan Dini Masyarakat	Sosialisasi dan terbentuknya SK Panitia	-	-	-	-	-	120 orang	120 orang	100%	
1.19	1.19.01	17	03	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Terbentuknya Tim PAKEM dan Laporan	-	-	-	-	-	210 orang, 3 laporan razia	210 orang, 3 laporan razia	100%	
1.19	1.19.01	17	04	Operasional SATGAS Saber Pungli	Laporan operasional Satgas dan sosialisasi	-	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100%	
1.19	1.19.01	18		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat										
1.19	1.19.01	18	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Peserta Penyuluhan	70%	70%	100 peserta	100 peserta	89,32%	100 orang	100 orang	100%	
1.19	1.19.01	18	02	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika	Meningkatnya pemahaman siswa terhadap narkotika	-	-	4 laporan	4 laporan	94,22%	-	-	-	
1.19	1.19.01	18	04	Tes urine bagi ASN di ligkungan Pemko Bukittinggi	Teantaunya ASN yang memakai narkotika di Bukittinggi	-	-	-	-	-	420 orang	420 orang	100%	
1.19	1.19.01	19		Program Pendidikan politik masyarakat										
1.19	1.19.01	19	1	Koordinasi Forum Diskusi Politik	Laporan Forum Diskusi Politik	90%	90%	12 laporan	12 laporan	98,67%	12 laporan	12 laporan	100%	
1.19	1.19.01	19	2	Sosialisasi Undang-Undang Pemilu, Orkesmas dan lain-lain	Peserta Sosialisasi	70%	70%	50 orang	50 orang	78,45%	-	-	-	
				Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	Peserta Sosialisasi	70%	70%	50 orang	50 orang	78,45%	50 orang	50 orang	100%	
1.19	1.19.01	19	3	Penyusunan data base ormas dan LSM dan partai politik	Database ormas, LSM dan Peol	90%	90%	40 Eks	40 Eks	95%	-	-	-	
1.19	1.19.01	19		Fasilitasi dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	Laporan Fasilitasi	80%	80%	2 laporan	2 laporan	100%	-	-	-	
1.19	1.19.01	19	07	Tim Teadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri dan konflik sosial	Adanya rencana aksi penanganan koflik sosial	-	-	4 laporan	4 laporan	81,27%	4 laporan	4 laporan	100%	
				Bimbingan Teknis Penyusunan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Paol	Laporan Pelaksanaan Bimtek	80%	80%	-	-	-	50 orang	50 orang	100%	



KESBANGPOL



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017		CATATAN
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.19	1.19.01	19	04	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Berita Acara Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	90%	90%	11 paol	8 paol	63,64%	11 Paol	11 Paol	100%	
1.19	1.19.01	19	07	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Masyarakat yang mengikuti seminar/sosialisasi	70%	70%	100 orang	100 orang	90,75%	50 orang	50 orang	100%	
1.19	1.19.01	19	08	Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan Ormas	70%	70%	1 thn	1 thn	99,63%	12 ormas	12 ormas	100%	
				Kegiatan Sosialisasi Pilkada 2015	Laporan Pembinaan Ormas	70%	70%	-	-	-	-	-	-	



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah ini menggunakan beberapa indikator sesuai dengan tugas kewenangan serta mengacu kepada target Renstra perangkat daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi telah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Aspek, Fokus, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), indikator kinerja pelayanan Kantor Kesbangpol telah mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2008 tersebut.

Indikator kinerja pelayanan perangkat daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, meningkatkan nilai-nilai kesatuan bangsa, ketahanan ekonomi, sosial budaya serta juga peningkatan pembinaan dan pendidikan politik dalam negeri.

Kinerja pelayanan Kantor Kesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, melaksanakan pelayanan-pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu :

a. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data kantor;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program kantor;
- 4) Penyusunan laporan kantor;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan kantor;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan kantor;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran kantor;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran kantor;



- 9) Pengelolaan kearsipan;
 - 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kantor;
 - 11) Pengelolaan data kepegawaian kantor; dan
 - 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai kantor;
- b. Pelayanan Eksternal
- 1) Penyiapan bahan perijinan penelitian mahasiswa dan izin keramaian;
 - 2) Fasilitasi pengajuan pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
 - 3) Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA);
 - 4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
 - 5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
 - 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - 7) Fasilitasi Layanan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
 - 8) Fasilitasi Pencegahan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
 - 8) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
 - 9) Fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan

Kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dapat diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apa bila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dan dalam penetapan kinerja dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dapat dikategorikan baik.

Analisis kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, bela Negara dan wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kota Bukittinggi dalam kondisi yang heterogen (suku, agama, ras dan antar golongan).



KESBANGPOL



2. Meningkatnya keamanan, ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
3. Meningkatnya iklim demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat di daerah, menyelenggarakan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi bagi institusi masyarakat serta masyarakat itu sendiri agar memiliki pemahaman yang baik mengenai betapa pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggung jawab.
4. Meningkatnya kualitas kehidupan dan kohesi social serta pemberdayaan Ormas/LSM guna teeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif.

Capaian kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi secara rinci disajikan dalam tabel T-C.30.:

Tabel. T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	Ada perbedaan IKU pada tahun 2015 & 2016 dengan IKU 2017 & 2018 karena ada perubahan nomenklatur sehingga indikatornya berbeda
2	Persentase teeliharanya kerukunan antar umat beragama			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
3	Persentase pemahaman masyarakat terhadap bahaya minuman keras dan narkoba			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
4	Persentase teantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing dan NGO			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
5	Persentase teantaunya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional dan daerah			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
6	Persentase terfasilitasinya koordinasi forum diskusi politik			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
7	Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang pemilu dan orkesmas			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
8	Persentase meningkatnya kesadaran beolitik dan oerhanisasi masyarakat			100%	100%	-	-	88%	100%	-	-	
9	Persentase meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pilkada			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
10	Persentase teantaunya pelaksanaan tahapan pemilu pada tahun 2015			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
11	Persentase Peningkatan Kesadaran Bela Negara			-	100%	-	-	100%	100%	-	-	
12	Persentase peningkatan pemahaman siswa tentang narkoba			-	100%	-	-	100%	100%	-	-	
13	Persentase pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba di Kota Bukittinggi			-	100%	-	-	100%	100%	-	-	
14	Persentase Terlaksananya Operasionalisasi Kominda dalam mendeteksi dini potensi gangguan			-	100%	-	-	100%	100%	-	-	



KESBANGPOL



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
	konflik di tengah-tengah masyarakat											
15	Persentase Peserta Peningkatan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan dan pembauran			-	100%	100%		-	-	100%	100%	
16	Persentase Penurunan Konflik Sosial			-	100%	100%		-	-	100%	100%	
17	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.			-	100%	100%		-	-	100%	100%	
18	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat			-	100%	100%		-	-	100%	100%	
19	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu			-	100%	100%		-	-	100%	100%	
20	Persentase partisipasi pemilih pada pileg/pilpres			-	-	-	0%	-	-	-	0%	
21	Persentase partisipasi pemilih pada pilkada			-	-	-	0%	-	-	-	0%	
22	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif			-	-	-	10%	-	-	-	10%	
22	Jumlah partai politik yang dibina			-	-	-	15 parpol	-	-	-	15 parpol	
22	Persentase laporan forum kewaspadaan dini yang ditindaklanjuti			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
22	Jumlah sinergitas lintas sektoral yang terjalin			-	-	-	10 lembaga	-	-	-	10 lembaga	
22	Persentase kelompok masyarakat yang melaporkan aktifitasnya			-	-	-	75%	-	-	-	75%	
22	Jumlah Kasus penyimpangan ideologi negara			-	-	-	0 kasus	-	-	-	0 kasus	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam pencapaian visi, misi Kepala Daerah teilih secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik.
2. Sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Perangkat Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam permasalahan dan hambatan yang sangat krusial dalam pelaksanaan tugas. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:



KESBANGPOL



- a) Belum meratanya tingkat pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi
 - b) Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi
 - c) Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan masyarakat terhadap pengaruh globalisasi
 - d) Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
 - e) Masih tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan kriminalitas.
 - f) Masih terdapatnya konflik sosial dan aksi unjuk rasa yang berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
 - g) Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.
3. Meningkatkan hubungan yang harmonis dengan instansi dan satuan terkait agar terciptanya stabilitas politik. Melaksanakan pemantauan dibidang politik dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undang di bidang politik. Pengoptimalisasian pembinaan/sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pengoptimalan pengetahuan setiap lapisan masyarakat tentang pentingnya pencegahan penggunaan dan peredaran gelap narkoba. Meningkatkan kerjasama antara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat pemerintah agar terwujud kondisi yang aman tentram dan kondusif. Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Dan juga berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”**. Serta secara tidak langsung juga mendukung program nasional di bidang stabilitas politik dan keamanan dan program lainnya.
4. Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah didukung oleh :



KESBANGPOL



- a) Kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian Kota Bukittinggi;
 - b) Kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah".
 - c) Beerannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam kehidupan bermasyarakat.
 - d) Kemajuan teknologi berbasis internet;
 - e) Keterbukaan informasi publik;
 - f) Kemajuan dan kecanggihan alat komunikasi (smartphone);
5. Formulasi isu-isu penting untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah :
- a) Tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Melakukan sejumlah sosialisasi undang-undang bidang politik dan pembekalan untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi serta mewujudkan *Good and Clean Governance* dan implementasi demokratisasi kehidupan politik masyarakat
 - b) Peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan kriminalitas. Melakukan sejumlah langkah strategis untuk mendukung upaya penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diantaranya melalui pelaksanaan tes urine, penyuluhan tentang bahaya narkoba disekolah-sekolah dan pembentukan Kompani (Komunitas Pemuda Anti Narkoba) serta berbagai upaya preventif lainnya.
 - c) Pemantapan wawasan kebangsaan. Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeiharaan keutuhan NKRI
 - d) Mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial. Beerannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta aparat



pemerintah dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.

- e) Forum-forum koordinasi. Memaksimal pengelolaan tugas pokok dan fungsi forum-forum koordinasi yang telah ada dan membentuk forum-forum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD ditujukan untuk membandingkan antara arahan Kepala Daerah terkait dengan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal RKPD dengan hasil rumusan identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan pencapaian target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi disusun sebagai landasan dasar dalam menentukan kebijakan strategis dengan harapan mampu memecahkan sebagian persoalan yang dihadapi khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan Daerah, Nasional maupun global. Perbandingan dilakukan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul agar capaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun dapat tercapai.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Ruang lingkup perencanaan pembangunan ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Walikota Bukittinggi. Pengukuran pencapaian rencana dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara kontinyu dilakukan agar diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.



KESBANGPOL



Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD terkait dengan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi mempertimbangkan kebutuhan yang ada, secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada tabel T-C.31 review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.



KESBANGPOL



Tabel. T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Bukittinggi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bukittinggi	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai		316,719,200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bukittinggi	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai		273,906,410	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	Perangko, Materai dan Buku Cek	400 Lbr Materai dan 2 Buku Cek, dan Perangko	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	Perangko, Materai dan Buku Cek	451 Lbr Materai dan 2 Buku Cek, dan Perangko	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	Tagihan Rekening Telepon dan Internet	24 Tagihan	7,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	Tagihan Rekening Telepon dan Internet	12 Bulan	30,160,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Bukittinggi	Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	53,256,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bukittinggi	Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	52,584,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	Luas Kantor / Jumlah Ruangan yang dilayani jasa kebersihan	2 Ruangan	31,658,200	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	Jumlah Ruangan yang dibersihkan	3 Ruangan	38,700,200	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat jasa perbaikan	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	3,300,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat jasa perbaikan	5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer	1,500,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	13,795,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	11,695,200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bukittinggi	Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 Macam Barang Cetakan dan 1 Paket Penggandaan	10,010,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bukittinggi	Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Macam Barang Cetakan dan 12 bulan penggandaan	10,010,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	1 Paket	1,750,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	8 macam	1,750,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	Makanan dan Minuman yang disediakan	1 paket	10,650,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	Makanan dan Minuman yang disediakan	130 bungkus makan, 40 porsi minum, 90 kotak snack, 1 paket makan minum ruang Kakan	8,470,000	
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang difasilitasi	1 Tahun	180,000,000	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Laporan perjalanan dinas	12 bulan	114,500,000	
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	Jumlah Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	4 Paket	2,500,000	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	Jumlah Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	1 Paket	2,537,210	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bukittinggi	Jumlah Dokumen/Laporan yang sesuai standar	8 Dokumen/ Laporan (Renstra, Renja, RKA/DPA, LKIP, LPPD, LRA, Neraca, CaLK)	2,020,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bukittinggi	Jumlah Dokumen/Laporan yang sesuai standar	8 Dokumen/ Laporan (Renstra, Renja, RKA/DPA, LKIP, LPPD, LRA, Neraca, CaLK)	-	



KESBANGPOL



	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Bukittinggi	Laporan Kinerja Perangkat Daerah	10 Eks	568,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Bukittinggi	Laporan Kinerja Perangkat Daerah	10 Eks	-	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Bukittinggi	Laporan Keuangan Semesteran	10 Eks	965,000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Bukittinggi	Laporan Keuangan Semesteran	10 Eks	-	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Bukittinggi	Rencana Kerja dan Keuangan Perangkat Daerah	18 Eks	487,000	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Bukittinggi	Rencana Kerja dan Keuangan Perangkat Daerah	18 Eks	-	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Bukittinggi	Teantaunya Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization		1,369,159,500	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Bukittinggi	Teantaunya Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization		498,629,000	
	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Bukittinggi	Laporan Kominda	12 Laporan	371,680,000	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Bukittinggi	Laporan Kominda	12 Laporan	348,500,000	
	Pengawasan Orang Asing	Bukittinggi	Laporan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization	12 laporan	292.750.000	Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization	Bukittinggi	Kasus terkait keberadaan orang asing, lembaga asing dan NGO	12 Kasus	22,557,000	
	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Bukittinggi	Laporan FKDM	12 laporan	55.847.500	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Bukittinggi	Kasus Potensi Konflik Yang diselesaikan	12 Kasus	14,731,000	
	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Teadu Penanganan Konflik Sosial	Bukittinggi	Laporan Tim Teadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial	5 berkas	184.681.000	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Teadu Penanganan Konflik Sosial	Bukittinggi	Rencana Aksi Tim Teadu Penanganan Konflik Sosial dan Evaluasinya	1 berkas	9,100,500	
	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/ Ijin Penelitian dan Keramaian	Bukittinggi	Laporan evaluasi	12 Laporan	50.000.000	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/ Ijin Penelitian dan Keramaian	Bukittinggi	Laporan pemantauan dan evaluasi	24 Laporan	9,936,500	
	Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Di Daerah	Bukittinggi	Laporan Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Di Daerah	1 kegiatan	25.000.000	Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Di Daerah	Bukittinggi	Laporan Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Di Daerah	1 kegiatan	-	
	Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	Bukittinggi	Laporan Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Ketahanan Bencana Kt B. Tinggi	1 kegiatan, 12 Kali pengawasan	25.000.000	Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	Bukittinggi	Laporan Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Ketahanan Bencana	1 kegiatan, 12 Kali pengawasan	-	
	Satgas Saber Pungli	Bukittinggi	Laporan Saber Pungli	12 laporan	364.201.000	Satgas Saber Pungli	Bukittinggi	Sosialisasi Saber Pungli	1 Kegiatan	93,804,000	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bukittinggi	Persentase jumlah gangguan keamanan yang dapat diredam akibat gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain		419.965.500	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bukittinggi	Persentase jumlah gangguan keamanan yang dapat diredam akibat gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain		60,527,800	
	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Bukittinggi	Laporan Forum Pembauran Kebangsaan	4 Laporan	71,305,500	Forum Pembauran Kebangsaan	Bukittinggi	Laporan Forum Pembauran Kebangsaan	1 Laporan	3,815,000	
	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Bukittinggi	Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	150 Orang	99.330.000	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Bukittinggi	Peserta Pembinaan	150 Orang	23,409,000	
	Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	Bukittinggi	Laporan Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	30 Orang	99,330,000	Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	Bukittinggi	Laporan Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	4 Kegiatan	33,303,800	
	Pelatihan Pembangunan	Bukittinggi	Peserta Pelatihan	100 orang	150.000.000	Pelatihan Pembangunan	Bukittinggi	Peserta Pelatihan	100 orang	-	



KESBANGPOL



Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental		Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental			Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental		Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental			
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Bukittinggi	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum		1,307,607,000	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Bukittinggi	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum		2,219,477,800	
Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Laporan Forum Diskusi Politik	12 Laporan	998.085.000	Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Laporan Koordinasi Forum Diskusi Politik	24 Laporan	2,132,256,500	
Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	Hasil Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Paol	11 Paol	12.636.000	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	Hasil Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Paol	10 Paol	3,190,000	
Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Bukittinggi	Laporan Pembinaan dan Fasilitas Pendaftaran Ormas	12 ormas	35.000.000	Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Bukittinggi	Laporan Pembinaan dan Fasilitas Pendaftaran Ormas	12 ormas	20,243,500	
Bimtek Pengajaran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	Laporan Bimtek	40 orang	30.000.000	Bimtek Pengajaran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	Peserta Bimtek	50 orang	29,525,000	
Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Bukittinggi	Peserta Sosialisasi	50 orang	31.860.500	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Bukittinggi	Peserta Sosialisasi	50 orang	12,359,000	
Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Database Ormas/ LSM dan Paol	40 eks	22.138.500	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Buku Data Ormas	40 eks	6,178,800	
Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Bukittinggi	Peserta Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	100 Orang	17.820.000	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Bukittinggi	Peserta Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	100 Orang	15,725,000	
Pembinaan kepada kader Paol	Bukittinggi	Laporan pembinaan	1 Laporan	250.000.000	Pembinaan kepada kader Paol	Bukittinggi	Laporan pembinaan	1 Laporan	-	
Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada	Bukittinggi	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum		500.000.000	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada	Bukittinggi	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum		327,597,300	
Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada	Bukittinggi	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif	1 Laporan	200.000.000	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada	Bukittinggi	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif	1 Laporan	94,492,300	
Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada	Bukittinggi	Laporan Fasilitas dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Legislatif	9 Laporan	300.000.000	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada	Bukittinggi	Laporan Fasilitas dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Legislatif	6 Laporan	233,105,000	
Program Pencegahan, Penanganan Dan Rehabilitasi Narkoba	Bukittinggi	Jumlah kasus narkoba di Bukittinggi		644.283.500	Program Pencegahan, Penanganan Dan Rehabilitasi Narkoba	Bukittinggi	Jumlah kasus narkoba di Bukittinggi		644.283.500	
Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Bukittinggi	Peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	100 Orang	74.549.000	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Bukittinggi	Peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	150 Orang	27,186,500	
Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Bukittinggi	Pelaksanaan Peringatan HANI	1 Kegiatan	100.000.000	Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Bukittinggi	Pelaksanaan Peringatan HANI	1 Kegiatan	-	
Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Laporan Kompani	1 Laporan	44.088.000	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Laporan Kompani	1 Laporan	43,138,000	
Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Bukittinggi	Laporan hasil tes urine	1250 orang	250.000.000	Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Bukittinggi	Laporan hasil tes urine	600 orang	55,322,000	
Pencegahan, penanganan	Bukittinggi			125.646.500	Pencegahan, penanganan	Bukittinggi			-	



KESBANGPOL



	dan rehabilitasi narkoba					dan rehabilitasi narkoba					
	Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	Bukittinggi	terlaksananya sosialisasi melalui media elektronik	1 kegiatan	50.000.000	Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	Bukittinggi	terlaksananya sosialisasi melalui media elektronik	1 kegiatan	-	
	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Bukittinggi	Tingkat pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan		76.000.000	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Bukittinggi	Tingkat pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan		18,502,500	
	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Bukittinggi	Kegiatan Upacara Kesadaran Nasional	12 kali	76.000.000	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Bukittinggi	Laporan kegiatan	4 kegiatan	18,502,500	
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Bukittinggi	Tingkat Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama		395.847.500	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Bukittinggi	Tingkat Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama		125,646,500	
	Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Bukittinggi	Peserta Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	100 orang/ 4 kali pengawasan	350.000.000	Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Bukittinggi	Peserta Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	210 orang	178,205,500	
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Laporan Dewan Penasehat FKUB	4 laporan	45.847.500	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Laporan Dewan	1 laporan	3,780,000	
	Total				5.121.535.200					3,706,272,810	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2018.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yaitu melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat tidak mengakomodir melalui Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KESBANGPOL

Menetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan merupakan bentuk dan arah masa depan organisasi sehingga dapat mengarahkan organisasi dalam memberikan rumusan mengenai keadaan yang direncanakan dan sebagai gambaran masa depan yang diinginkan dalam periode perencanaan serta untuk mendukung dan mengawal visi dan misi Walikota Bukittinggi teilih periode 2016 – 2021.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan tujuan dan sasaran juga selaras dengan Visi Kementerian Dalam Negeri *“Mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”*

Dengan Misi:

- ❖ *Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri*
- ❖ *Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan*
- ❖ *Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan beihak kepada rakyat*
- ❖ *Mendorong terwujudnya keserasihan dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan*



KESBANGPOL



- ❖ *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik*

Dalam mendukung misi pertama yaitu, Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri dan tujuan strategis, Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara dengan sasaran strategis :

1. Teeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
2. Teeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas

Serta dengan melihat Visi Walikota Bukittinggi yaitu *“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”*, dengan Misi ke 5 *“Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat”*, tujuan ke 1 *“Meningkatnya Kunjungan Wisatawan”*, sasaran ke 1 *“Meningkatkan pelayanan pariwisata”*, dan strategi ke 29 *“Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan”*.

Meskipun tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat mendukung dalam meningkatkan stabilitas keamanan wilayah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik senantiasa mengoptimalkan koordinasi dengan Jajaran Kominda dan melaksanakan pemantauan-pemantauan ke wilayah Kota Bukittinggi guna mendapatkan informasi secara dini dan mampu memberikan masukan terkait kondisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya masyarakat sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi. Dengan terciptanya stabilitas keamanan wilayah tentunya juga menimbulkan daya tarik bagi para wisatawan dan memberikan rasa aman bagi semua stake holder yang turut serta dalam percepatan pembangunan di wilayah Kota Bukittinggi.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan mengarah pada kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan pelaksanaan yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menetapkan tujuan dan sasaran dimaksud sebagai berikut :

a. Tujuan.

Tujuan yang akan diwujudkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yaitu *"Meningkatnya Kenyamanan Kota Bukittinggi"*.

b. Sasaran

- 1) Meningkatkan stabilitas politik.
- 2) Meningkatkan Pengendalian Sosial Masyarakat Kota Bukittinggi.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan rumusan tujuan, sasaran dan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta fungsinya :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Pemberian dukungan atas Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c) Pemberian dukungan atas Kewaspadaan Dini;
- d) Peningkatan Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat;
- e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



KESBANGPOL



Maka dalam perumusan program dan kegiatan Tahun 2018 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan bermuara dalam upaya pencapaian visi dan misi Walikota Bukittinggi.

2) Pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*).

SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggang waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diimplentasikan untuk mencapai tujuan dari SDGs antara lain mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan, khususnya wilayah Kota Bukittinggi.

3) Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggung-jawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan.



Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

1) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Program utama :

- a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan 3 kegiatan :
 - (1) Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
 - (2) Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 - (3) Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara
- b) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan 6 kegiatan :
 - (1) Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah
 - (2) Pengawasan Orang Asing
 - (3) Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat
 - (4) Optimalisasi Pelaksanaan Tim Teadu Penanganan Konflik Sosial
 - (5) Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian
 - (6) SATGAS Saber Pungli
- c) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan 7 kegiatan :
 - (1) Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi
 - (2) Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
 - (3) Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik



KESBANGPOL



- (4) Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
- (5) Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat
- (6) Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
- (7) Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi
- d) Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar, dengan 1 kegiatan :
 - (1) Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya
- e) Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, dengan 2 kegiatan :
 - (1) Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada
 - (2) Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada
- f) Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama, dengan 2 kegiatan :
 - (1) Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
 - (2) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi
- g) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba, dengan 2 kegiatan :
 - (1) Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
 - (2) Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi
 - (3) Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi
- Program Penunjang :
- h) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 2 kegiatan :
 - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- (3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - (4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - (5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - (7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (9) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - (10) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi
 - (11) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - i) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 2) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kota Bukittinggi.
- 3) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.
Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas berjumlah 9 Program dengan 35 kegiatan serta total anggaran 3.706.272.810 yang seluruhnya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bukittinggi
- c. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.
Adanya program dan kegiatan serta pagu indikatif yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, disebabkan oleh sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendekatan penganggaran teadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan



KESBANGPOL



di lingkungan SKPD. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Maka untuk pencapaian efisiensi pendanaan, maka diadakan pengurangan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.



KESBANGPOL



Tabel. T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Bukittinggi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif ()	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif ()
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur			-				40,186,000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi		-	APBD		6 unit meja 1/2 biro, 6 unit kursi kantor	13,236,000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi		-	APBD		3 unit komputer all in one, 2 unit printer	26,950,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			273,906,410				308,744,080
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	451 Lbr Materai dan 2 Buku Cek, dan Perangko	2,000,000	APBD		447 lbr materai, 4 buku cek	2,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	12 bulan	30,160,000	APBD		12 bulan	30,160,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Perawatan, Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bukittinggi	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	52,584,000	APBD		2 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan dinas roda 2	52,584,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	3 Ruangan	38,700,000	APBD		3 Ruangan	40,000,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer	1,500,000	APBD		5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer	10,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	1 Paket	11,695,200	APBD		41 macam	12,029,700

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018



KESBANGPOL



				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	4 Macam Barang Cetak dan 12 bulan penggandaan	10,010,000	APBD		7 macam	11,282,000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	8 macam	1,750,000	APBD		3 macam	2,899,600
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	130 bungkus makan, 40 porsi minum, 90 kotak snack, 1 paket makan minum ruang Kakan	8,470,000	APBD		130 bungkus makan, 30 porsi minum, 100 kotak snack, 1 paket makan minum ruang kakan	17,290,000
				Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	114,500,000	APBD		1 tahun	120,000,000
				Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	1 Paket	2,537,210	APBD		5 Dokumen	10,498,780
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD			-				-
				Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan/ pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan			60,527,800				65,100,300
				Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Terselenggaranya Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Bukittinggi	1 Laporan	3,815,000	APBD		12 laporan	-
				Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Bukittinggi	150 orang	23,409,000	APBD		150 orang	18,350,500
				Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Terselenggaranya Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	Bukittinggi	4 Kegiatan	33,303,800	APBD		30 orang	46,749,800



KESBANGPOL



				Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Penurunan konflik pada penyelenggaraan pemilu/pilkada			327,597,300				514,937,550
				Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Terselenggaranya Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Bukittinggi	1 Laporan	94,492,300	APBD		10 kali sosialisasi, 2 paket iklan layanan masyarakat	272,536,800
				Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Terselenggaranya Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Bukittinggi	8 laporan	233,105,000	APBD		8 laporan	176,300,750
				Desk Pemilu / Pilkada	Tersedianya Fasilitas Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Bukittinggi	-	-	APBD		8 laporan	66,100,000
				Program pendidikan politik masyarakat	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum			2,219,477,800				2,390,582,000
				Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Bukittinggi	24 Laporan	2,132,256,500	APBD		24 Laporan	2,228,841,000
				Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terselenggaranya Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	10 Paol	3,190,000	APBD		10 Paol	6,528,500
				Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Bukittinggi	12 ormas	20,243,500	APBD		12 ormas	87,857,500
				Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Terselenggaranya Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	50 orang	29,525,000	APBD		50 orang	31,831,000
				Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Bukittinggi	50 orang	12,359,000	APBD		-	-
				Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	40 eks	6,178,800			40 eks	35,524,000
				Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Bukittinggi	100 orang	15,725,000	APBD		-	-
				Program pencegahan penanganan dan rehabilitasi narkoba	Persentase Penurunan kasus narkoba di Bukittinggi			125,646,500				262,994,625

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018



KESBANGPOL



				Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Terselenggaranya Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Bukittinggi	150 Orang	27,186,500	APBD		1000 orang (13 sekolah)	97,774,625
				Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	43,138,000			1 Laporan	98,790,000
				Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Terselenggaranya Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Bukittinggi	600 orang	55,322,000	APBD		750 orang	66,430,000
				Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan konflik sosial			498,629,000				709,185,000
				Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Terselenggaranya Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Bukittinggi	12 laporan	348,500,000	APBD		12 laporan	-
				Pengawasan Orang Asing	Terselenggaranya Pengawasan Orang Asing	Bukittinggi	12 kasus	22,557,000	APBD		12 kasus	-
				Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Bukittinggi	12 laporan	14,731,000			12 laporan	593,671,500
				Optimalisasi Pelaksanaan Tim Teadu Penanganan Konflik Sosial	Terselenggaranya Optimalisasi Pelaksanaan Tim Teadu Penanganan Konflik Sosial	Bukittinggi	1 berkas	9,100,500	APBD		1 berkas	34,300,500
				Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian	Terselenggaranya Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian	Bukittinggi	24 laporan	9,936,500	APBD		24 laporan	9,941,500
				SATGAS Saber Pungli	Terselenggaranya SATGAS Saber Pungli	Bukittinggi	1 Kegiatan	93,804,000	APBD		1 kali sosialisasi/pembinaan dan 1 paket iklan layanan masyarakat	71,271,500
				Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan			18,502,500				156,285,375
				Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Terselenggaranya Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Bukittinggi	4 kegiatan	18,502,500	APBD		4 kegiatan	156,285,375

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018



KESBANGPOL



				Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Penurunan konflik yang menyangkut agama dan aliran kepercayaan			181,985,500				193,432,760
				Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Terselenggaranya Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Bukittinggi	210 orang	178,205,500	APBD		210 orang	182,708,700
				Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	3,780,000			1 laporan	10,724,060
				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur			-				40,186,000
					Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi		-	APBD		6 unit meja 1/2 biro, 6 unit kursi kantor	13,236,000
					Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi		-	APBD		3 unit komputer all in one, 2 unit printer	26,950,000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			273,906,410				308,744,080
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	451 Lbr Materai dan 2 Buku Cek, dan Perangko	2,000,000	APBD		447 lbr materai, 4 buku cek	2,000,000
				Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	12 bulan	30,160,000	APBD		12 bulan	30,160,000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Perawatan, Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bukittinggi	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	52,584,000	APBD		2 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan dinas roda 2	52,584,000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	3 Ruangan	38,700,000	APBD		3 Ruangan	40,000,000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer	1,500,000	APBD		5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer	10,000,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	1 Paket	11,695,200	APBD		41 macam	12,029,700

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018



KESBANGPOL



				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	4 Macam Barang Cetak dan 12 bulan penggandaan	10,010,000	APBD		7 macam	11,282,000
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	8 macam	1,750,000	APBD		3 macam	2,899,600
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	130 bungkus makan, 40 porsi minum, 90 kotak snack, 1 paket makan minum ruang Kakan	8,470,000	APBD		130 bungkus makan, 30 porsi minum, 100 kotak snack, 1 paket makan minum ruang kakan	17,290,000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	114,500,000	APBD		1 tahun	120,000,000
TOTAL								3,706,272,810				4,641,447,690



KESBANGPOL



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KANTOR KESBANGPOL

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini:



KESBANGPOL



Tabel.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				KET
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			273,906,410		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	451 Lbr Materai dan 2 Buku Cek, dan Perangko	2,000,000	APBD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	12 bulan	30,160,000	APBD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Perawatan, Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bukittinggi	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	52,584,000	APBD	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	3 Ruangan	38,700,000	APBD	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer	1,500,000	APBD	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	1 Paket	11,695,200	APBD	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	4 Macam Barang Cetak dan 12 bulan penggandaan	10,010,000	APBD	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	8 macam	1,750,000	APBD	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	130 bungkus makan, 40 porsi minum, 90 kotak snack, 1 paket makan minum ruang Kakan	8,470,000	APBD	
Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	114,500,000	APBD	
Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	1 Paket	2,537,210	APBD	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD			-		
Program Pemantauan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan/ pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan			60,527,800		
Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Terselenggaranya Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Bukittinggi	1 Laporan	3,815,000	APBD	
Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Bukittinggi	150 orang	23,409,000	APBD	
Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Terselenggaranya Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	Bukittinggi	4 Kegiatan	33,303,800	APBD	
Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Penurunan konflik pada penyelenggaraan pemilu/pilkada			327,597,300		



KESBANGPOL



Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Terselenggaranya Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Bukittinggi	1 Laporan	94,492,300	APBD	
Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Terselenggaranya Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Bukittinggi	8 laporan	233,105,000	APBD	
Program pendidikan politik masyarakat	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum			2,219,477,800		
Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Bukittinggi	24 Laporan	2,132,256,500	APBD	
Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terselenggaranya Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	10 Paol	3,190,000	APBD	
Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Bukittinggi	12 ormas	20,243,500	APBD	
Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Terselenggaranya Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	50 orang	29,525,000	APBD	
Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Bukittinggi	50 orang	12,359,000	APBD	
Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	40 eks	6,178,800		
Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Bukittinggi	100 orang	15,725,000	APBD	
Program pencegahan penanganan dan rehabilitasi narkoba	Persentase Penurunan kasus narkoba di Bukittinggi			125,646,500		
Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Terselenggaranya Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Bukittinggi	150 Orang	27,186,500	APBD	
Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	43,138,000		
Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Terselenggaranya Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Bukittinggi	600 orang	55,322,000	APBD	
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan konflik sosial			498,629,000		
Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Terselenggaranya Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Bukittinggi	12 laporan	348,500,000	APBD	
Pengawasan Orang Asing	Terselenggaranya Pengawasan Orang Asing	Bukittinggi	12 kasus	22,557,000	APBD	
Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Bukittinggi	12 laporan	14,731,000		
Optimalisasi Pelaksanaan Tim Teadu Penanganan Konflik Sosial	Terselenggaranya Optimalisasi Pelaksanaan Tim Teadu Penanganan Konflik Sosial	Bukittinggi	1 berkas	9,100,500	APBD	
Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian	Terselenggaranya Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian	Bukittinggi	24 laporan	9,936,500	APBD	
SATGAS Saber Pungli	Terselenggaranya SATGAS Saber Pungli	Bukittinggi	1 Kegiatan	93,804,000	APBD	
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan			18,502,500		



KESBANGPOL



Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Terselenggaranya Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Bukittinggi	4 kegiatan	18,502,500	APBD	
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Penurunan konflik yang menyangkut agama dan aliran kepercayaan			181,985,500		
Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Terselenggaranya Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Bukittinggi	210 orang	178,205,500	APBD	
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	3,780,000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			273,906,410		
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	451 Lbr Materai dan 2 Buku Cek, dan Perangko	2,000,000	APBD	
Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	12 bulan	30,160,000	APBD	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Perawatan, Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bukittinggi	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	52,584,000	APBD	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	3 Ruangan	38,700,000	APBD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer	1,500,000	APBD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	1 Paket	11,695,200	APBD	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bukittinggi	4 Macam Barang Cetakan dan 12 bulan penggandaan	10,010,000	APBD	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	8 macam	1,750,000	APBD	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	130 bungkus makan, 40 porsi minum, 90 kotak snack, 1 paket makan minum ruang Kakan	8,470,000	APBD	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	114,500,000	APBD	
JUMLAH				3,706,272,810		



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Kantor Kesbangpol dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bukittinggi.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bukittinggi yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Kantor Kesbangpol.

Alokasi Anggaran indikatif pada tahun 2018 yang di peruntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja dikelompokkan dalam Belanja Langsung Non Urusan sebesar Rp 273.906.410,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) serta Belanja Langsung Urusan Wajib sebesar Rp 3.432.366.400,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Kantor Kesbangpol. Dengan demikian total anggaran seluruhnya untuk Belanja Langsung sebesar Rp 3.706.272.810,00 (tiga miliar tujuh ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Kantor Kesbangpol mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program dan kegiatan, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan Kota Bukittinggi.

Selanjutnya, Rencana Kerja ini dapat dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan



KESBANGPOL



bentuk pengoperasionalan rencana kerja ke dalam proses penganggaran dan pada akhirnya dapat dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi guna mencapai tujuan pembangunan Kota Bukittinggi khususnya dan nasional umumnya.

Bukittinggi, Mei 2017

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

